

Doktrin fasilitas penting dalam putusan KPPU perkara Nomor.03/KPPU-L/2008 tentang hak siar liga utama inggris berdasarkan hukum persaingan usaha = Essential facilities doctrine in KPPU decision case Number. 03/KPPU-L/2008 about broadcasting rights for english premier league based on competition law

Septiana Winarprianti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389128&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Doktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatan menghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagi produksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwa salah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Doktrin ini berkaitan dengan penguasaan pasar dan juga praktek monopoli sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keberadaan doktrin ini dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa mengenai batasan atas penerapan doktrin tersebut dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penerapannya dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 03/KPPU-L/2008 tentang Hak Siar Liga Utama Inggris, apakah telah memenuhi ketentuan dari prasyarat/karakteristik Doktrin Fasilitas Penting tersebut. Penelitian atas tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian tesis ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan Doktrin Fasilitas Penting ini memiliki batasan sehingga doktrin ini dapat disimpangi. Batasan tersebut timbul ketika terdapat pengaturan di dalam undang-undang atas fasilitas penting. Selain itu berkaitan dengan izin atas penggunaan fasilitas penting dari pihak yang berwenang. Serta apabila dalam fasilitas penting tersebut terdapat unsur Hak Kekayaan Intelektual. Setelah dilakukan analisa lebih jauh dalam Putusan KPPU tersebut, diketahui bahwa Majelis Komisi telah benar menyatakan bahwa hak siar Liga Inggris adalah fasilitas penting. Sehingga akses untuk mendapatkan hak siar harus dibuka kepada publik, tidak dikhususkan hanya untuk televisi berbayar tertentu saja. Atas penggunaan doktrin tersebut diharapkan KPPU lebih jeli dalam menentukan karakteristik fasilitas penting, karena setiap kasus mengenai penguasaan pasar itu berbeda

<hr>

ABSTRACT

Essential Facilities Doctrine is a blocking activity of business competitors to use important facilities for the production and distribution of business competitors.

This doctrine reveals that one of monopoly action conducted by one (or more) business actor (s) who control important facilities by closing access for its business competitors to use those important facilities. This doctrine relates with market control as well as monopoly practices based on Law Number 5 of 1999 about Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research is aimed to find out and analyze the limitation of this doctrine implementation on the perspective of business competition and the implementation on KPPU Decision Case Number 03/KPPU-L/2008 about Broadcasting Rights for UK Premier League, whether it meets the provisions of prerequisites/characteristic of this Essential Facilities Doctrine. This research is conducted using the normative juridical research method. This research revealed that on the implementation of Essential Facilities Doctrine there was a limitation so that this doctrine can be remain unfulfilled. This limitation occurred when there was provisions in the Law on important facilities. In addition, related with permits on the use of these important facilities from the authorities. Also, if there was elements of Intellectual Property Rights. After thorough analysis on KPPU Decision, it is revealed that broadcasting rights for English Premier League is important facility. So that the access to get the broadcasting rights should be opened to the public, not only specific just for certain television. On the utility of this doctrine, it was hoped that KPPU would be more careful in deciding the characteristic of important facilities, because each case on market control is different